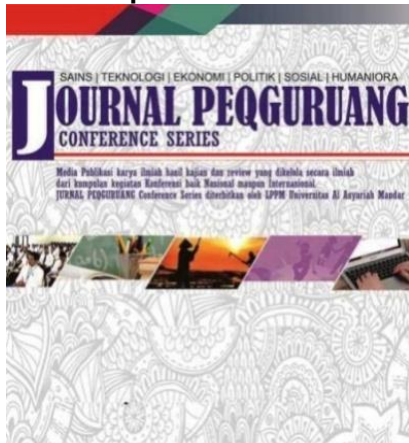


Graphical abstract



PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR

^{1*}Ahmadi, ²Suardi Kaco, ³Andi Sudarmin

¹²³Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding author

madiahmadi957@gmail.com

Abstract

The aims of this study were to Determine the role of the Social Service in Community Empowerment through Joint Business Groups (KUBE) at the Social Service of Polewali Mandar Regency, and Knowing what are the inhibiting and supporting factors of the Social Service in empowering the community through the joint business group (KUBE) program at the Social Service of Polewali Mandar Regency. This type of research uses a qualitative approach to determine the purpose of the role of social services in community empowerment through joint business groups (KUBE) and what factors are obstacles to community empowerment through joint business groups (KUBE). The results showed that KUBE was one of the programs carried out by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, which later through the Polewali Mandar Social Service carried out the program as a way to reduce poverty in Indonesia. Based on the data obtained in its implementation, the role of the Polewali Mandar Social Service has carried out its role in the form of Strengthening, Protection, and Support. This role is carried out to support the implementation of the KUBE program in the community. There are also factors that are inhibiting and supporting in its implementation. The supporting factors with the existence of the KUBE program are: 1) There is good coordination between the Facilitator and the KUBE group in running the program; 2) Right on target in accordance with the potential of natural resources so as to facilitate the implementation of the KUBE program; 3) The accuracy of the targets shown by the KUBE program with the applicable provisions; 4) The pattern of assistance in assisting KUBE program activities. The inhibiting factors in the KUBE program are: 1) The low quality of human resources in the implementation of the KUBE program; 2) Facilities and infrastructure are still inadequate in the implementation of the KUBE program; 3) There are many KUBE groups, only a few are assistants. The implications of this research are: 1) Calling on all elements involved in the KUBE empowerment program to continue to run the joint business being carried out, because the program has a good impact. Also aims to address social welfare that has not been achieved; 2) For related agencies, it is necessary to make improvements to support the success of this KUBE program.

Keywords: Role, Social Service, Joint Business Group (KUBE)

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah agar dapat Mengetahui Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, dan Mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui tujuan peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUBE ialah salah satu program yang Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang kemudian dari Dinas Sosial Polewali Mandar menjalankan program tersebut sebagai salah satu cara agar dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Atas dasar data yang didapatkan dalam pelaksanaannya, peranan Dinas Sosial Polewali Mandar telah melakukan peranannya berupa Penguatan, Perlindungan, dan Pendukungan. Peranan tersebut dilakukan, guna menunjang pelaksanaan program KUBE yang ada di masyarakat. Terdapat pula faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dengan adanya program KUBE ialah yaitu : 1) Adanya koordinasi yang baik antar Pendamping dengan kelompok KUBE dalam menjalankan program; 2) ketepatan sesuai dengan potensi sumber daya alam sehingga mempermudah pelaksanaan program KUBE; 3) Ketepatan sasaran yang ditunjukkan oleh program KUBE dengan ketentuan yang berlaku; 4) Pola pendampingan dalam mendampingi kegiatan program KUBE. Faktor penghambat dalam program KUBE ialah yaitu : 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KUBE; 2) Sarana dan prasarana masih kurang memadai dalam pelaksanaan program KUBE; 3) Banyaknya kelompok KUBE, sedikit yang menjadi Pendamping. Implikasi dari penelitian ini ialah yaitu : 1) Menghimbau kepada seluruh unsur yang terlibat dalam program pemberdayaan KUBE agar dapat tetap menjalankan usaha bersama yang dilakukan, karena program tersebut memberikan dampak yang baik. Juga bertujuan agar dapat mengatasi kesejahteraan sosial yang belum tercapai; 2) Bagi Instansi yang terkait, perlu adanya peningkatan yang dilakukan agar dapat menunjang keberhasilan dari program KUBE ini.

Kata Kunci : Peran, Dinas Sosial, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2246>

Received : 09 September 2021 | Received in revised form : 23 Oktober 2021 | Accepted : 17 November 2021

1. PENDAHULUAN

Keajaiban kemelaratan ialah masalah sosial yang sampai saat ini masih menjadi tirai rahasia yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai proyek, terutama dari pemerintah lingkungan yang diandalkan agar dapat mempunyai pilihan menjawab rahasia ini dengan niat penuh agar dapat mencapai kesuksesan bagi penghuninya. Organisasi bantuan sosial yang bertanggung jawab atas bantuan pemerintah sosial telah mengoordinasikan beberapa latihan program agar dapat mencapai bantuan pemerintah sosial. Hal ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 bahwa Kependudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Bab III Pasal 4 yang berbunyi “Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelesaikan urusan Pemerintah dalam wilayah sosial. (Dewi Puspita Sari, 2020)”

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ialah media penguatan sosial yang bertujuan agar dapat membuat latihan keuangan bagi masyarakat miskin agar dapat mengerjakan bantuan sosial pemerintah, yang melalui pertemuan dapat berkoordinasi, saling membantu dalam mengurus masalah dan mengatasi kebutuhan Kementerian Sosial. Kedekatan rumah, jenis usaha, atau kemampuan individu, aksesibilitas aset atau kondisi topografi dan landasan kehidupan sosial, mempunyai inspirasi serupa. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ialah pekerjaan yang diselesaikan bersama-sama dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh mitra. Pembinaan sosial ialah siklus membangun hubungan persahabatan antara fasilitator dan KUBE, dan wilayah sekitarnya agar dapat mengatasi masalah, memperkuat bantuan, menggunakan berbagai sumber dan kemungkinan dalam menangani kebutuhan hidup, dan meningkatkan penerimaan individu terhadap administrasi sosial dasar, bisnis pembukaan dan kantor bantuan publik Kementerian Sosial (Anggita Ratna Ningtyas, 2017).

Dengan pernyataan yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa peran dinas sosial bukan hanya melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat saja dalam upaya membentuk KUBE melainkan harus disertai dengan pembekalan kreativitas sebagai media agar dapat menciptakan peluang usaha. Tujuan penulisan skripsi ini ialah ingin mengetahui peran dinas sosial dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program KUBE atau Kelompok Usaha Bersama agar dapat memberi gambaran pelaksanaan program KUBE. Penelitian ini bertujuan Agar dapat mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Agar dapat mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

2. METODE PENELITIAN

Secara Umum ada beberapa jenis penelitian yang dikelompokkan menurut tempatnya, tujuan, pendekatan, dan tipenya. Jenis penelitian sangatlah penting dalam mengkaji sebuah topik permasalahan, hal ini dikarenakan tiap topik penelitian mempunyai situasi dan kondisi serta tujuan yang berbeda (Harbani Pasololog, 2005). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informasi dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin memperoleh gambaran keterangan yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji (Lisa Harrison, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar ialah lembaga yang bertanggung jawab terhadap rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2017 Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

Berkaitan dengan fungsinya yaitu pemberdayaan masyarakat, menjadi hal penting agar dapat diketahui terkait peranannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat juga mampu agar dapat menilai progres dari Pemerintah Daerah yang khususnya ialah Dinas Sosial. Lebih dari itu, juga bertujuan sebagai bahan mnegevaluasi terkait dengan kinerja dari Dinas Sosial itu sendiri. Salah satu pemberdayaan yang perlu agar dapat diketahui peran Dinas Sosial ialah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini menjalankan dan melaksanakan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Permensos 2/2019. Sehingga peranan Dinas Sosial juga ikut diatur dalam Permensos 2/2019 tersebut. Keterlibatan Dinas Sosial dalam KUBE sendiri ialah sebagai berikut :

- a. Pembentukan KUBE
- b. Permohonan dan Pencairan UEP
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Secara ketentuan yang berlaku, peran Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tidak jauh dari ketentuan yang ada dalam Permensos 2/2019. Maka dalam melakukan penilaian terhadap peranan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar perlu didasari ketentuan dalam Permensos 2/2019 itu sendiri. Hal ini agar lebih komperhensif dalam menilai dan melihat peranan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam membentuk dan memberikan izin terhadap KUBE di Polewali Mandar.

Berkaitan dengan pembentukan KUBE di Polewali Mandar, menurut Pegawai Dinas Sosial Bapak Syarifuddin Amin, S.IP, M.M, menjelaskan bahwa :

“Pertama-tama, masyarakat yang ingin mengajukan KUBE membuat proposal terlebih dahulu yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa, kemudian diajukan ke Dinas Sosial. Kemudian dari Pihak Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu, mengecek NIK dan KK yang bersangkutan sebelum menyetujui proposal tersebut. Ketentuan dari kami (Dinas Sosial Polewali Mandar) jumlah perkelompok 10 (sepuluh) orang, jumlah tersebut ialah jumlah maksimal dalam satu kelompok. Karena diharapkan mereka berkolaborasi dalam meningkatkan perekonomian dan selain itu menumbuhkan jiwa sosial (gotong royong, partisipasi, kesetiakawanan). Dalam pembentukan KUBE, dari Dinas Sosial memilih tiap 1 Kecamatan 2 Desa agar dapat disetujui diberikan bantuan dana KUBE (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin yang bernama Syarifuddin Amir, S.IP., MM pada tanggal 3 Mei 2021).”

Dinas Sosial dalam menyetujui proposal pengajuan agar dapat KUBE itu sendiri, terdapat prosedur yang menjadi acuan dalam memberikan bantuan

Dalam pelaksanaannya, peranan Dinas Sosial ialah hal yang penting dan sangatlah mendasar. Menurut Suharto peran akan mengarah dan berpusat pada pendampingan sosial sehingga Dinas Sosial dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan masalah sosial di suatu daerah dengan baik (Edi Suharto, 2014).

Sehingga dalam hal ini, atas dasar hasil penelitian yang didapatkan bahwa Peranan Dinas Sosial ialah sebagai berikut :

a. Penguatan

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan suatu pendampingan sosial di setiap kelompok KUBE yang ada. Atas dasar hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Bapak Syarifuddin Amin, S.IP, M.M, mengatakan bahwa :

“KUBE yang telah disetujui kita akan lakukan pelatihan agar dapat usaha yang akan dijalankan. Hal ini dilakukan oleh Pendamping yang telah dibentuk dan dilatih oleh Dinas Sosial. Seperti pelatihan dalam penggemukan hewan ternak atau pembibitan dan perawatan sayur dan tumbuhan. Jadi, ada pelatihan terlebih dahulu yang harus dilalui oleh tiap kelompok KUBE itu sendiri (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin yang bernama

Syarifuddin Amir, S.IP., MM pada tanggal 3 Mei 2021).”

Dalam kegiatan program KUBE masyarakat, Pendamping telah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada setiap anggota kelompok-kelompok KUBE terkait dengan pengolahan usaha yang dijalankan oleh masing-masing kelompok. tiap pendamping mendampingi 10 Kelompok KUBE. Sehingga dalam hal ini, Dinas Sosial dengan dibantu oleh Pendamping telah melaksanakan aspek penguatan terhadap KUBE itu sendiri.

Maka dalam hal ini, apabila meninjau penguatan sosial yang dilakukan oleh peran Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, telah membantu masyarakat agar dapat lebih mengetahui proses dalam menjalankan kelompok usaha bersama tersebut. Peranan Dinas Sosial adanya kemandirian dalam menajalankan kelompok tersebut, tentunya terlebih dahulu melakukan penguatan baik secara pengetahuan dan keterampilan anggota masyarakat KUBE tersebut.

Maka penguatan dalam hal ini, sangat berperan penting agar dapat menunjang keberlangsungan KUBE bagi masyarakat. Dengan penguatan, masyarakat diharapkan mampu menjalankan usaha atau kegiatannya sesuai dengan usaha yang dijalankan dan kondisi yang ada di wilayahnya dalam menjalankan usaha tersebut.

b. Perlindungan

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan dan menjalankan perlindungan terhadap tiap-tiap anggota kelompok KUBE. Atas dasar hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Bapak Syarifuddin Amin, S.IP, M.M, mengatakan bahwa :

“KUBE yang telah disetujui oleh Dinas Sosial Polewali Mandar, kemudian dibuatkan Surat Penetapan bahwa kelompok yang akan diberikan bantuan melalui APBD. Kemudian dari Kementerian Sosial juga memberikan Surat Penetapan kepada KUBE tersebut sebagai bentuk bahwa KUBE tersebut dapat menerima bantuan dari Dinas Sosial. Kemudian mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang diadakan oleh Dinas Sosial terhadap kelompok KUBE tersebut (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin yang bernama Syarifuddin Amir, S.IP., MM pada tanggal 3 Mei 2021).”

Dengan adanya Surat Penetapan yang dibuat dan diberikan kepada KUBE melalui dinas sosial dapat dijadikan dasar hukum dalam menunjang legalitas keberadaan KUBE yang telah disetujui. Sehingga agar dapat KUBE mengikuti segala prosedur yang ada dalam Permensos 2/2019 tersebut. Surat Penetapan tersebut juga berfungsi sebagai administrasi dinas sosial dalam melaporkan program yang berjalan kepada Kementerian Sosial itu khususnya terkait dengan KUBE.

Perlindungan dalam hal ini ialah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidakimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil (Edi Suharto, *Ibid*..

Dalam memberikan perlindungan, peran Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dibantu oleh pendamping sosial. Menurut pendamping sosial dalam aspek memberikan perlindungan, mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan perlindungan sebenarnya, selaku Pendamping lebih kepada aspek penyelesaian masalah di kelompok KUBE yang murni dilakukan oleh kesalahan anggota KUBE maka peran Pendamping dapat digunakan seperti memberikan teguran atau ikut membantu menyelesaikan. Namun, apabila Pendamping tidak mampu agar dapat membantu menyelesaikan masalah maka pendamping akan berkomunikasi dengan Dinas Sosial yang menangani KUBE (Hasil wawancara dengan salah satu Pendamping bernama Bapak Basri pada tanggal 24 Mei 2021).”

Maka dalam hal ini, peranan dinas sosial telah berjalan dan telah terlaksana dalam menjalankan aspek perlindungan sosial terhadap KUBE itu sendiri. Perlindungan sosial sangatlah berperan penting agar dapat kesejahteraan masyarakat pula tentunya. Maka baik dari aspek sosial dan aspek perlindungan hukum mempunyai fungsi dan tujuan agar tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat itu sendiri.

c. Pendukungan

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan pendukungan kepada setiap anggota kelompok-kelompok KUBE. Atas dasar hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Bapak Syarifuddin Amin, S.IP, M.M, mengatakan bahwa:

“Kelompok KUBE yang mengajukan program usahanya dan yang terpilih atas dasar pengamatan kami (Dinas Sosial), kami mendukung agar dapat terus bertahan menjalankan program usahanya. Baik lewat pelatihan dan pendampingan, evaluasi dan pelaporan yang kami terima. Hal tersebut yang menjadi peran kami dalam mendukung usaha yang dijalankan oleh tiap KUBE yang ada (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin yang bernama Syarifuddin Amir, S.IP., MM pada tanggal 3 Mei 2021).”

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan anggota tiap KUBE mulai memahami dan sudah

mengerjakan dalam pengelolaan bantuan yang disediakan agar dapat KUBE tersebut. Sehingga kesadaran yang timbul tidak lagi di dasari oleh peranan Dinas Sosial keseluruhan, namun terdapat juga peranan dari anggota tiap-tiap KUBE tersebut dalam menjalankan dan mengelola usaha yang dijalankan tersebut.

Pendukungan dalam hal ini ialah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendukung masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan (Edi Suharto, *Op.Cit.*).

Dalam hal ini dengan adanya pendamping agar dapat menilai aspek dukungan terhadap KUBE itu sendiri. Dilakukan dengan cara adanya pengontrolan terhadap perkembangan KUBE itu sendiri.

Dengan adanya peranan dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar ini, sangat berguna agar dapat keberlangsungan hidup sejahtera masyarakat yang tidak mampu agar dapat meningkatkan kebutuhan ekonominya. Sehingga peranan dari Dinas Sosial dengan dilakukannya penguatan, perlindungan dan pendukungan terhadap jalannya KUBE itu sendiri, memberikan semangat kepada masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan didukung peran pendamping yang juga membantu dalam melaksanakan peranan dinas sosial juga sangatlah berperan penting. Peran pendamping disini ialah meningkatkan kesadaran pada setiap anggota kelompok agar mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjalankan usaha secara bersama, setiap anggota kelompok diharapkan dapat mempunyai kesadaran agar dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Dalam pelaksanaannya pendamping KUBE akan memberikan pemahaman bagi setiap anggota kelompok agar mempunyai rasa kebersamaan dalam menjalankan usaha mereka secara bersama, sehingga mereka mampu mandiri dengan usaha yang mereka jalankan. Pendamping juga turut membantu kelompok dalam menganalisis berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap anggota kelompok hal ini bukan dimaksudkan agar dapat mencari tahu siapa anggota kelompok yang terbaik namun, hal ini perlu dilakukan agar setiap anggota kelompok mampu mengisi berbagai kekurangan yang ada pada mereka satu dengan yang lain

Atas dasar data yang didapatkan baik dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dan Pendamping sosial yang bertugas, telah sesuai dalam menjalankan aspek pemberdayaan masyarakat yang mengikuti program KUBE itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme Dinas Sosial dalam berperan sebagai penghubung atau sarana dan penanggung jawab dalam mengusahakan KUBE ini terus berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Dalam pelaksanaannya juga, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan program KUBE itu sendiri. Faktor

pendukung dan penghambat di dapatkan atas dasar penelitian di lapangan. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya ialah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung ialah faktor yang membuat pelaksanaan atau implementasi dari adanya program KUBE ini dalam pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program tersebut. faktor-faktor yang mendukung dalam penerapan KUBE, ialah sebagai berikut :

- a. Adanya koordinasi yang baik antar Pendamping dengan kelompok KUBE dalam menjalankan program.

Program KUBE diharapkan mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal dari program. Adanya koordinasi yang baik antara setiap unsur (baik Pendamping, Dinas Sosial dan anggota kelompok KUBE ialah faktor pendukung yang juga dianggap penting dalam pelaksanaan program KUBE ini. Adanya koordinasi yang rutin dilaksanakan agar pelaksanaan program KUBE ini dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program KUBE ini dibutuhkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang baik antar unsur atau pihak yang terkait dengan pelaksanaan program. Implementasi program dapat berjalan dengan baik jika masing-masing pihak yang terlibat mengetahui peranan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program KUBE dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- b. Tepat sasaran sesuai dengan potensi sumber daya alam sehingga mempermudah pelaksanaan program KUBE

Faktor pendukung lainnya dalam implementasi program KUBE dapat berjalan dengan baik yaitu dengan kesesuaian potensi sumber daya alam sehingga mempermudah pelaksanaan program KUBE. Memang salah satu penunjang terciptanya usaha yang baik jika kebutuhan akan sumber daya alam bisa dapat dipenuhi dengan baik.

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kesesuaian sumber daya alam yang cukup melimpah membuat pelaksanaan program KUBE ini semakin mudah dan berjalan dengan baik. Memang dengan tersedianya sumber daya alam yang banyak dan sesuai dengan usaha yang dijalankan akan lebih memudahkan kegiatan usaha-usaha yang mereka lakukan secara bersama-sama. Dengan adanya sumber daya alam yang banyak ini, harus di manfaatkan secara baik oleh tiap anggota kelompok KUBE, agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dari terlaksananya program KUBE ini.

- c. Ketepatan sasaran yang ditunjukkan oleh program KUBE dengan ketentuan yang berlaku

Pelaksanaan program tentunya harus sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh para penerima

bantuan KUBE ini. Manfaat yang diperoleh oleh penerima bantuan harus sesuai dengan sasaran yang tepat yang diberikan oleh Pemerintah.

Hal ini memang salah satu penunjang adanya keberhasilan KUBE dan memanfaatkan program KUBE ini dengan baik. Implementasi program KUBE ini dalam pemberian bantuan memang tepat sasaran. Bahkan perlu adanya pengecekan lebih lanjut agar dapat mengetahui anggota dalam tiap kelompok KUBE memang berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Jadi, bantuan ini diberikan memang kepada masyarakat yang kurang mampu terutama dalam hal finansialnya.

- d. Pola pendampingan dalam mendampingi kegiatan program KUBE

Faktor pendukung lainnya dalam implementasi program KUBE dapat berjalan dengan baik yaitu dengan merumuskan dan menjalankan pola pendampingan terhadap pelaksanaan program KUBE. Memang salah satu penunjang terciptanya usaha yang baik jika adanya bentuk atau pola pendampingan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Basri selaku Pendamping KUBE menyatakan bahwa :

“supaya bisa melihat keberhasilan dari program KUBE itu sendiri, bagi Pendamping perlu adanya pola pendampingan yang harus dirumuskan dan dijalankan pastinya. supaya dapat mengetahui, melatih dan membantu kelompok KUBE agar dapat menjalankan programnya. Dalam pola pendampingan pun, terdapat targetan dan tujuan yang perlu didapatkan oleh tiap Pendamping (Hasil wawancara dengan salah satu Pendamping kelompok KUBE yang bernama Bapak Basri pada tanggal 24 Mei 2021).”

Sehingga atas dasar data yang didapatkan, diketahui bahwasanya dengan adanya pola pendampingan membuat kelompok KUBE ini menjadi terarah dan dapat dinilai tingkat keberhasilan dalam menjalankan program KUBE tersebut. Selain itu, dapat diketahui bahwa dengan adanya pola pendampingan juga dapat membantu dalam mengetahui usaha agar dapat memenuhi dan meningkatkan kebutuhan hidup tiap kelompok KUBE yang ada.

2. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan program KUBE ini ada juga faktor penghambat dalam implementasi program KUBE ini. Faktor penghambat ialah faktor yang membuat pelaksanaan program KUBE sedikit terhambat dalam hal kelancarannya. Pelaksanaan program KUBE ini mempunyai faktor penghambat yang dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KUBE

Sumber daya manusia menjadi pokok utama dalam pelaksanaan suatu program. Pelaksanaan program KUBE juga membutuhkan sumber daya manusia yang baik agar dapat pelaksanaan program.

Karena memang sumber daya manusia ini mempengaruhi pelaksanaan program KUBE ini. Memang yang mendapat dana bantuan program KUBE ini ialah masyarakat kurang mampu, jadi memang sumber daya manusianya masih rendah. Hal ini selaras dengan pernyataan dari masing-masing narasumber yang sudah saya temukan faktanya di lapangan.

Kemudian terdapat pendapat yang juga bersesuaian dengan Pendapat dari Pendamping, yaitu Bapak Muhammad selaku salah satu Ketua Kelompok KUBE mengatakan bahwa :

“Masih banyak I juga anggota yang kurang aktif dalam menjalankan program KUBE ini. Jadi dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang, ada beberapa sekitaran 1-3 orang belum aktif secara penuh dalam menjalankan dan menanggapi permasalahan kelompok KUBE ini. Jadi ini menghambat jalannya program usaha bersama ini (Hasil wawancara dengan salah satu Ketua Kelompok KUBE yang bernama Bapak Muhammad pada tanggal 29 Mei 2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program KUBE ialah masih rendahnya kualitas manusia atau anggota kelompok yang mengikuti program KUBE tersebut. Rendahnya kualitas dari anggotanya ditandai dengan masih kurangnya kesadaran dari masing-masing anggota agar dapat berkembang sesuai dengan alur atau jalannya suatu program yang ditentukan.

Kemudian, masih kurangnya keaktifan dalam ikut serta menjalankan KUBE juga menjadi penghambat dalam kelancaran program. Selain itu, dengan rendahnya kesadaran anggota dalam melaksanakan program KUBE ini seharusnya dapat di tingkatkan karena dalam hal ini ialah salah satu faktor penghambat KUBE.

b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai dalam pelaksanaan program KUBE

Implementasi dalam suatu program juga harus ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana digunakan agar dapat mengembangkan program agar sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Pengembangan sarana dan prasarana dalam program kelompok KUBE harus selaku ada supaya terciptanya manfaat dari program tersebut. Menurut Bapak Basri selaku salah satu Pendamping mengatakan bahwa :

“Program bisa berjalan karena memang ada sarana atau alat yang disediakan. Dalam kelompok KUBE ini tentunya juga masih banyak kendala di aspek sarana dan prasarana. Sarana agar dapat memotong rumput dan agar dapat membersihkan kandang sapi itu yang belum ada, karena bantuan awal dulu belum bisa membelinya, ini masih kita kembangkan usaha supaya kita bisa beli alatnya (Hasil wawancara dengan salah satu Pendamping kelompok KUBE yang bernama Bapak Basri pada tanggal 24 Mei 2021)..”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh salah satu kelompok KUBE, Bapak Muhammad mengatakan bahwa :

“Iya, disini kurang alat agar dapat usaha kami disini. Karena masih belumpi ada alatnya, agar dapat potong rumput besihkan kandang sapinya juga. Jadi, itu menghambat kita agar dapat kerja ngurus KUBE kalo begitu. Karena belum ada lagi ini juga bantuan sarana dan prasarana ini dari Dinas Sosial (Hasil wawancara dengan salah satu Ketua Kelompok KUBE yang bernama Bapak Muhammad pada tanggal 29 Mei 2021).”

Dari kesimpulan wawancara di atas diketahui bahwa memang ada beberapa faktor menghambat yang dialami dalam pelaksanaan program KUBE ini salah satunya ialah sarana dan prasarana masih kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan program KUBE ini. Menurut beberapa sumber memang dalam hal sarana dan prasarana masih kurang karena memang usaha belum berkembang dengan baik. Hal tersebut memang perlu diperhatikan karena satu program dapat berjalan dengan baik bila sarana dan prasarannya dapat terpenuhi dengan baik.

c. Banyaknya kelompok KUBE, sedikit yang menjadi Pendamping

Dalam pelaksanaannya, kelompok KUBE didampingi dengan salah satu Pendamping agar dapat membantu menjalankan program kegiatan KUBE. Khususnya di Daerah Polewali Mandar, dalam menjalankan tugasnya Pendamping dibagi per 1 (satu) orang mendampingi 10 kelompok. Namun, dalam perkembangannya hal ini menjadi kendala dalam membantu mendampingi kelompok KUBE. Salah satu Pendamping kelompok KUBE yang bernama Bapak Basri mengatakan bahwa :

“Faktor yang menjadi hambatan lainnya ialah banyak kelompok KUBE, tapi pendampingnya sedikit. Jadi banyak yang kesusahan dalam menjalankan kinerjanya. Apalagi banyak juga pendamping yang memang banyak kesibukannya, seperti sudah ada usahanya sendiri, pegawai dan banyak lagi. Jadi ini juga kendala dalam menjalankan tugas pendampingan terhadap kelompo KUBE. Makanya, banyak juga KUBE itu tidak terdampingi jadinya gagal jalannya (Hasil wawancara dengan salah satu Pendamping kelompok KUBE yang bernama Bapak Basri pada tanggal 24 Mei 2021).”

Pendamping ialah bagian yang penting dalam melakukan pengontrolan dan pengembangan KUBE itu sendiri. Pencarian data terhadap pelaksanaan KUBE itu sendiri ialah hal-hal yang menjadi tugas Pendamping. Data atau informasi yang didapatkan dari Pendamping, kemudian diteruskan kepada dinas sosial agar dapat kemudian di ketahui progres yang di jalankan oleh tiap-tiap kelompok KUBE. Pendamping mempunyai peranan

yang lebih dikarenakan dalam hal ini, Pendampinglah yang terjun langsung dan mengetahui lebih banyak terkait dengan kondisi yang dialami oleh tiap-tiap kelompok KUBE.

Sehingga jika melihat pelaksanaannya, maka diperlukan adanya konsep pendampingan yang dibuat oleh dinas sosial agar dapat mengatasi hal tersebut. Dengan berbagai kendala dari Pendamping dalam menjalankan tugasnya, juga dibutuhkan kuantitas pendamping dalam mendampingi kelompok KUBE yang ada di Polewali Mandar. Karena jika 1 (satu) orang per 10 (sepuluh) kelompok akan sulit bagi Pendamping agar dapat mengontrol dan mendetailkan setiap data dan informasi yang didapatkan oleh Pendamping itu sendiri. Sehingga Dinas Sosial Polewali Mandar, perlu mengatasi permasalahan kuantitas pendamping tersebut.

Atas dasar data didapatkan di lapangan terkait dengan faktor pendukung dan penghambat memberikan jawaban terkait dengan perkembangan KUBE itu sendiri yang ada di Polewali Mandar. Hal ini sangat penting agar dapat menilai proses KUBE yang dijalankan oleh dinas sosial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya tentunya juga terdapat penghambat yang perlu agar dapat diselesaikan oleh Dinas Sosial Polewali Mandar dalam mensukseskan program KUBE ini.

4. SIMPULAN

Dalam bab sebelumnya telah diuraikan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan. Atas dasar hal tersebut, terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan oleh Penulis, sebagai berikut:

Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

- a. Peran Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan terhadap KUBE yang ada di Polewali Mandar, telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 Bahwa Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Agar dapat Penanganan Fakir Miskin (Permensos 2/2019) ialah ketentuan yang menjadi acuan bagi Dinas Sosial dalam melakukan pemberdayaan terhadap KUBE yang ada.
- b. Dinas Sosial dalam menjalankan pemberdayaan terhadap KUBE yang ada, dibantu oleh Pendamping sosial. Pendamping sosial diatur juga dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Bantuan Sosial Usaha, ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama agar dapat penanganan fakir miskin. Dari tata cara pembentukan hingga tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh Pendamping sosial. Pendamping sosial kemudian yang nantinya akan terjun langsung mendampingi, baik dalam pencarian dana, pelatihan dan memberikan laporan kepada Dinas Sosial.

Faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

- a. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor yang menjadi pendukung dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap KUBE. Data yang ditemukan, faktor yang menjadi pendukung ialah 1) koordinasi yang baik antar Pendamping dengan kelompok KUBE dalam menjalankan program; 2) sesuai dengan potensi sumber daya alam sehingga mempermudah pelaksanaan program KUBE; 3) ketepatan sasaran yang ditunjukkan oleh program KUBE dengan ketentuan yang berlaku; dan 4) pola pendampingan dalam mendampingi program KUBE.
- b. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap KUBE. Faktor yang menjadi penghambat ialah 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KUBE; 2) Sarana dan prasarana masih kurang memadai dalam pelaksanaan program KUBE; dan 3) Banyaknya kelompok KUBE, sedikit yang menjadi Pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- Beik Irfan Syauqi dan Arsyianti Laily Dwi, (2010) *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,), h 70
- Bahri Samsul Ali, *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Keamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*, h 18
- Harrison Lisa, (2009) *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana,), h 102
- Hakim Ahmad Nur, *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenanga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Bayumas*, Skripsi, h 8
- IndrikaRistinura, (2013) *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Studi Khusus Di Desa Wonokerso Tembarak Temanggung*, Skripsi, (yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,), h 2
- Ningtyas Anggita Ratna, (2017) *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi, (Malang: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,), h 5

- Pasololog Harbani,(2005)*Metode Penelitian Administrasi*, (Makassar: Lembaga Penerbitan Univesitas Hasanudin,.) h. 35.
- Sari Dewi Puspita,(2020)*Strategi Komonikasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komonikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,.) h 2
- Suharto Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 34
- Suharto Edi,(2014)*Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Refika Aditama,h. 19.